

## **Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019**

**Rimi Gusliana Mais<sup>1,\*</sup>, Windi Yuniara<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jl.Kayu jati, Rawamangun 13320

\*[rimigusliana@gmail.com](mailto:rimigusliana@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana Efektivitas penerimaan retribusi daerah DKI Jakarta periode 2015-2019 (2) bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data target retribusi daerah tahun 2015-2019 dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2015-2019, dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015-2019. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas, dan analisis kontribusi. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2015-2019 masuk dalam kategori cukup efektif. (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 berkontribusi sangat kurang dan rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

**Kata kunci :** retribusi daerah, pendapatan asli daerah

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out (1) how the effectiveness of receiving Jakarta levies for the 2015-2019 period (2) how the contribution of local levies to increasing local revenue in DKI Jakarta for the period 2015-2019. This study used descriptive qualitative method. Data techniques through observation, documentation and interviews. The data used are local retribution and local revenue. Data on the target of regional levies for 2015-2019 and the realization of revenue from regional levies in 2015- 2019, and the realization of local revenue for 2015-2019. The data analysis used in this study is an analysis that has authority and contribution analysis. The results of the study are: (1) the level of effectiveness for regional levies during 2015-2019 is categorized as quite effective. (2) The contribution of the regional levies to the increase in the original regional income of DKI Jakarta from 2015-2019 contributed very little and the contribution ratio tends to decrease every year.*

**Keywords:** *Regional Retribution, Local Revenue*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

DKI Jakarta adalah salah satu Provinsi yang masuk 10 besar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan membuat Jakarta menjadi pusat perekonomian. Hal tersebut mendorong pesatnya pembangunan gedung perkantoran, tempat tinggal pribadi, hotel, tempat makan dan tempat-tempat lainnya yang berdampak pada retribusi izin mendirikan bangunan dan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

Namun di sisi lain, retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan juga masih sulit untuk dapat membantu PAD lantaran kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) masih menjadi pertanyaan. Salah satu contohnya, bangunan ruko konstruksi baja dua lantai di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat, mencantumkan IMB nya hanya satu lantai menggunakan banner berwarna kuning yang biasanya dipakai untuk menunjukkan IMB rumah tinggal.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Ravianto, 2014 : 11). Efektivitas Retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah (Puspitasari, 2014:46).

Menurut Ahira (2012 : 77) kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Besar kontribusi ini dapat dicari dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Yuliasti dan Dewi, 2017)

Motivasi peneliti dalam penelitian ini ingin diperoleh bukti tentang hubungan antara Efektivitas penerimaan Retribusi daerah, Kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan pendapat asli daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019 yang mana hal ini sangat penting bagi setiap Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektifitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019?
2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019?

## **REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian oleh Sartika (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah Kota Palembang tahun 2014-2018 tidak efektif dan hanya tahun 2015 dalam kondisi kurang efektif. Penyebab tidak efektivitasnya retribusi daerah yaitu disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Retribusi yang paling tidak efektif adalah retribusi penggantian cetak peta sebesar, retribusi penyediaan dan/atau kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah (izin galian), retribusi kekayaan daerah dan retribusi parkir.

Selanjutnya penelitian oleh Yoduke dan Ayem (2015) menemukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, sangat efektif, dan pada 2010 efektif. Efisiensi Retribusi 2009-2014, seluruhnya melebihi 100% dan sangat tidak efektif. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2009 pada level ofless; Pada 2010, 2011, 2014 sedang; 2012 dan

2013 cukup baik. Kontribusi Retribusi 2009 pada tingkat yang sangat baik, kriteria 2010-2013 kurang, 2014 sangat kurang.

Penelitian selanjutnya oleh Wijoyo, *et al* (2019) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada daerah Kota Kediri diketahui terjadi trend peningkatan yang fluktuatif dari segi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah maupun retribusi daerahnya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa Kota Kediri memiliki realisasi penerimaan Pajak Daerah terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 111,449,577,194.86, dan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar Rp 68,957,535,990.43.

Penerimaan Retribusi Daerah terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 10,509,049,281.00, dan penerimaan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp932,291,800.00. Dan penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 293,065,134,148.36 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 126,032,764,149.66. Berdasarkan hasil penelitian di atas membuktikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik secara simultan maupun parsial.

## **Landasan Teori**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. UndangUndang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **Retribusi Daerah**

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*.

## **Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017). Efektifitas retribusi daerah bisa dikatakan efektif ketika hasil akhir perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006).

## **Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD**

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Kontribusi retribusi daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD. dan retribusi daerah sudah bisa dikatakan berkontribusi terhadap peningkatan

pendapatan asli daerah ketika hasil akhir perhitungan mencapai persentase diatas 40% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). jika hasil akhir sudah memenuhi kriteris tersebut baru bisa dikatakan kontribusi berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

## **METODA PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang lebih menekan pada makna. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Sugiyono, 2018 : 213).Data yang terkumpul berupa data kualitatif seperti hasil wawancara, dokumentasi dan juga data pendapatan retribusi berupa angka.

### **Strategi Penelitian**

Strategi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu studimengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerahdan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Menurut Sugiyono (2018 : 213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

### **Objek dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang berada di JL. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat. Waktu penelitian yang direncanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Juni 2020 s/d Agustus 2020. penelitian direncanakan akan terjadwal dan wawancara dengan responden (Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan dan Pengolah Data Retribusi). Mengenai efektif dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Alasan memilih objek penelitian pada BPRD adalah karena BPRD adalah instansi yang menangani atau mengelola data khusus pajak dan retribusi daerah.

## **POPULASI DAN SAMPEL**

### **Populasi**

Secara umum populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 – 2019.

## Sampel

Sampel pada Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kota DKI Jakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan Laporan mengenai Realisasi terhadap Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Kota DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 –2019.

## Metoda Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda analisis deskriptif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif. Dan juga menggunakan perhitungan dasar yang digunakan untuk menghitung efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dan kontribusi pemungutan retribusi di DKI Jakarta Periode 2015-2019. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Metode Analisis Deskriptif
- b. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD
- c. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
- d. Metode Wawancara
- e. Metode Observasi
- f. Metode Dokumentasi

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di DKI Jakarta Tahun 2015-2019

**Tabel 1. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah DKI Jakarta Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	610.000.000.000	459.459.498.063	75,32	Kurang efektif
2016	649.175.000.000	675.475.066.072	104,05	Sangat Efektif
2017	680.152.300.000	624.137.343.759	91,76	Efektif
2018	671.490.000.000	578.555.603.994	86,16	Cukup Efektif
2019	710.131.000.000	587.535.570.632	82,74	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 1. diatas, menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta sangat bervariasi, dilihat dari perolehan realisasinya yang tidak pernah mencapai target. Hanya pada tahun 2016 saja efektifitasnya encapai 104,05. Akan tetapi hasil akhir menunjukkan efektifitas penerimaan retribusi daerah mendapatkan hasil sebesar 88,08 dan

masuk dalam kriteria yang cukup efektif.

Selanjutnya Diperkuat juga oleh jawaban dari ibu Retno Utari, S.Kom selaku Pengolah Data Retribusi, beliau menyatakan ;

“Pada tahun 2019, realisasi retribusi jenis perijinan tertentu tidak mencapai target dikarenakan kurangnya minat masyarakat yang membuat Ijin Sedangkan di tahun 2020 , dikarenakan ada bencana Covid-19 menyebabkan berkurangnya realisasi retribusi, juga adanya kebijakan relaksasi retribusi dari Pemprov DKI Jakarta”

Ibu Retno menyatakan bahwa tidak tercapainya target retribusi disebabkan karna kurangnya minat masyarakat dalam membuat izin dan juga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya (membuat izin retribusi dan membayar retribusi) dan juga adanya relaksasi retribusi dari pemprov DKI Jakarta yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah kurang efektif.

### **Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019**

**Tabel 2. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah DKI Jakarta Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2015	459.459.498.063	33.686.176.815.708	1,37	Kurang efektif
2016	675.475.066.072	36.888.127.587.716	1,83	Sangat Efektif
2017	624.137.343.759	43.901.488.807.743	1,42	Efektif
2018	578.555.603.994	43.327.136.602.811	1,34	Cukup Efektif
2019	587.353.570.632	45.707.400.003.802	1,29	Cukup Efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. Data Diolah (2020)*

Dilihat dari tabel 2 bahwa presentasi kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah selama lima tahun berturut turut tidak mencapai 10%, walaupun pada kenyataannya penerimaan daerah dari retribusi setiap tahunnya lebih mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah, begitu juga dengan PAD yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara Retno Utari, S.Kom., selaku Pengolah Data Retribusi (Bidang Pendapatan Retribusi Dan Lain-lain PAD, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta) ,peneliti bertanya tentang bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di DKI Jakara, beliau menyatakan bahwa :

“Jika dibandingkan dengan kontribusi penerimaan Pajak daerah, kontribusi retribusi hanya sekitar 1,44% saja di tahun 2019 di DKI Jakarta. Dikarenakan rendahnya tarif retribusi dan retribusi merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat. meningkatnya penerimaan retribusi daerah secara otomatis meningkatkan pula pendapatan asli daerah yang diterima maka pemungutan Retribusi yang efektif turut memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.”

Ibu Retno menyatakan memang benar jika penerimaan pajak lebih efektif dibandingkan dengan penerimaan retribusi pada tahun 2019 dan begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan rendahnya tarif yang diberikan dan juga retribusi merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ibu Retno juga menyatakan meningkatnya penerimaan retribusi memang secara langsung meningkatkan juga pendapatan asli daerah, beliau juga mengatakan bahwa pemungutan retribusi yang efektif turut memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil wawancara dengan pejabat yang bekerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengenai efektifitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2015-2018. Peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan dan Pengolah Data Retribusi yang menyatakan bahwa:

1. Efektivitas penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta diatas 100 persen, sehingga dinyatakan sangat efektif. tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 104,05 persen. sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan memperoleh 82,74 persen.
2. Kontribusi penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta hanya mencapai 1,43 persen, sehingga dinyatakan sangat kurang. tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,29 persen, sedangkan tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 1,83persen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahira, A. 2012. *Terminologi Kosakata*. Jakarta : Bumi Aksara

**Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)**

Journal Homepage: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/>

ISSN: 2776-1177 (Media Online)

Arfani,M.2019. *DKI Genjot PAD, di Jakarta Pusat Retribusi IMB malah Bermasalah*.  
Diakses tanggal 25 Agustus 2020.

<https://pontas.id/2019/11/07/dki-genjot-pad-di-jakarta-pusat-retribusi-imb-malah-bermasalah/>.

Ersita, M and I.Elim. 2016 . Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol 4, No 1 ,889-897.

Mentayani, Ida, et al. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7 No. 1

Nugraha, P.L. 2018. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota*

*Bandung (Periode 2013-2017)*. Tugas akhir, Fakultas Ekonomi/Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

Putra,W.2018.*TataKelolaEkonomiKeuanganDaerah*. Jakarta : PTRajaGrafindo Persada

Putri, I.M. 2016. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2009-2014*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas MuhammadiyahSurakarta.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Usman, R. 2017. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *Journal Of Accounting And Finance*,1,1,1- 17.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (diakses tanggal 21 Agustus 2020 sebagai referensi)

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004. <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/26.pdf>

**Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)**

Journal Homepage: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/>

ISSN: 2776-1177 (Media Online)

(diakses tanggal 21 Agustus 2020 sebagai referensi)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hukumonline.com <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/> (diakses tanggal 2 November 2019 sebagai referensi Undang-undang).

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Hukumonline.com <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/> (diakses tanggal 2 November 2019 sebagai referensi Undang-undang).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hukumonline.com <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/> (diakses tanggal 2 November 2019 sebagai referensi Undang-undang).

Warsito. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Semesta